

BUPATI BUTON TENGAH DR AZHARI RESMIKAN TK GU TIMUR, WARGA HIBAHKAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN



- ✓ Peresmian TK Gu Timur di Kecamatan Gu
- ✓ Dihadiri Bupati Buton Tengah Dr. Azhari
- ✓ Warga hibahkan lahan untuk pembangunan TK
- ✓ Dukungan penuh warga untuk dunia pendidikan
- ✓ Langkah nyata wujudkan pendidikan berkualitas sejak dini

“ Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan Buton Tengah – Dr. Azhari



Bersama Membangun Generasi Cerdas, Buton Tengah Maju!

Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mendapat dukungan masyarakat untuk memperluas layanan pendidikan anak usia dini setelah warga menyerahkan hibah lahan bagi kepentingan pembangunan daerah. Penyerahan tersebut berlangsung bersamaan dengan peresmian Taman Kanak-Kanak (TK) Gu Timur oleh Bupati Buton Tengah Dr. Azhari di lingkungan SDN 17 Lakudo, Kecamatan Lakudo, Sabtu (22/8/2026).

Hibah lahan yang diserahkan La Musa menjadi bagian penting dari rencana pemerintah daerah menyiapkan fasilitas pendidikan yang lebih representatif bagi

anak-anak di Kelurahan Gu Timur. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah selanjutnya mengarahkan pengembangan TK tersebut agar memiliki gedung sendiri di kawasan

perisior Kelurahan Gu Timur.

Bupati Azhari menilai dukungan masyarakat berupa penyediaan lahan memiliki arti strategis karena pembangunan fasilitas

publik membutuhkan kepastian status tanah sejak tahap perencanaan. Menurut dia, hibah tersebut sekaligus memperlihatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah.

“Kepastian status lahan melalui hibah menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah,” kata Azhari.

Untuk sementara,

kegiatan pembelajaran TK Gu Timur masih memanfaatkan fasilitas SDN 17 Lakudo. Pemanfaatan tersebut menjadi solusi awal agar layanan pendidikan anak usia dini dapat berjalan sembari pemerintah daerah mempersiapkan sarana pendidikan yang lebih permanen di wilayah Gu Timur.

Azhari juga menekankan pentingnya

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Dorong Warga Masiri Jaga Bak Air dan Perkuat Kebersamaan



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP- Bupati Buton Selatan (Busel) H. Muhammad Adios meminta masyarakat Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga, tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memasti-

kan fasilitas umum tetap terawat. Pesan itu disampaikan saat menghadiri kegiatan pembersihan bak air sekaligus silaturahmi keluarga besar Masiri, Minggu (23/8/2026).

Menurut Adios,

Lanjut ke Hal: 7

Kapolres Baubau Rangkul Sara Kidhina, Dorong Persatuan Kesultanan Buton



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Upaya mendorong persatuan kelembagaan Kesultanan Buton terus dilakukan melalui komunikasi lintas unsur adat, agama, pemerintah, dan masyarakat. Kapolres Baubau

AKBP Noer Alam, S.I.K. menemui Sara Kidhina di Jalan Sultan Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Rabu (19/8/2026) malam, untuk meminta dukungan dalam

Lanjut ke Hal: 7

Wawali Baubau Wa Ode Hamsina Bacakan Sambutan Menteri, Remisi Jadi Jalan Reintegrasi Sosial, 173.706 Narapidana Terima Remisi



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau menegakkan pemberian remisi kepada warga binaan bukan semata-mata pengurangan

masa pidana, melainkan bagian dari proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Penegasan itu disampaikan Wakil Wali Kota Baubau, Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., saat membacakan sambu-

tan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia pada Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Baubau, Senin (17/8/2026).

Upacara yang

dirangkaikan dengan penyerahan Remisi Umum dan Pengurangan Masa Pidana tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pegawai Lembaga Pemasarakatan, serta tamu undangan. Momen kemerdekaan, menurut pemerintah, sekaligus menjadi kesempatan bagi warga binaan yang memperoleh remisi maupun kebebasan untuk memulai kembali kehidupan dengan sikap yang lebih baik dan

Lanjut ke Hal: 7

Cegah Kebakaran dan Kekeringan, BPBD Buton Selatan dan Polsek Batauga Turun Langsung Edukasi Warga dan Perkuat Pengawasan Sumber Api



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-Ancaman kebakaran dan kekeringan di tengah musim kemarau mendorong Badan Penanggulangan

gan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buton Selatan bersama Polsek Batauga memperkuat langkah pencegahan di tingkat masyarakat. Edukasi digencarkan untuk

menekan risiko kebakaran hutan, lahan, permukiman, sekaligus menjaga ketertahanan air bersih.

Upaya tersebut

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Tengah Azhari Resmikan TK Gu Timur, Hibah Lahan Warga Jadi Penopang Pembangunan

pendidikan anak usia dini sebagai tahap awal pembentukan karakter sebelum anak memasuki sekolah dasar. Pembiasaan disiplin, tanggung jawab, keteraturan, kemandirian, serta lingkungan belajar yang positif dinilai berperan dalam membangun kesiapan anak menghadapi jenjang pendidikan berikutnya.

“Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berkomitmen memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas,” ujarnya.

Secara nasional, perhatian terhadap PAUD telah memiliki landasan hukum sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Regulasi tersebut menempatkan PAUD sebagai pendidikan yang diselengga-

rakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan dapat berbentuk pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Di tingkat global, agenda pendidikan anak usia dini juga menguat sejak Forum Pendidikan Dunia di Dakar pada 2000 yang mendorong perluasan dan peningkatan layanan pengasuhan serta pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak yang rentan dan kurang beruntung.

Peresmian TK Gu Timur ditandai dengan penyerahan SK Peraturan Bupati tentang pembentukan TK Gu Timur, penyerahan seragam sekolah oleh Bunda PAUD Buton Tengah Umi Noranah Azhari, penyerahan dokumen hibah tanah, peng-

guntingan pita, peninjauan fasilitas sekolah, serta dialog pembangunan bersama masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut Plh. Sekda Buton Tengah Abdullah, Anggota DPRD Syarifudin Reno, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Laode Amaluddin, serta tokoh adat dan masyarakat Kecamatan Lakudo. Dengan dukungan hibah lahan tersebut, pemerintah daerah berharap pengembangan TK Gu Timur dapat memperluas pemerataan akses pendidikan sekaligus memperkuat pelayanan publik di wilayah pesisir Kelurahan Gu Timur.(*)

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Dorong Warga Masiri Jaga Bak Air dan Perkuat Kebersamaan

keberadaan fasilitas umum harus diikuti kesadaran masyarakat untuk memeliharanya. Bak air yang dibersihkan dalam kegiatan tersebut, kata dia, merupakan sarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga sehingga kondisinya perlu dijaga secara bersama-sama.

“Bak air ini digunakan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, mari kita jaga dan rawat bersama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” ujar Adios.

Ia menilai keterlibatan warga dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Partisipasi masyarakat diperlukan agar berbagai fasilitas dan program pembangunan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Kalau pemerintah dan masyarakat bersama-sama, berbagai persoalan di daerah akan lebih mudah kita

selesaikan,” katanya.

Kegiatan pembersihan bak air sekaligus menjadi ruang mempererat hubungan kekeluargaan masyarakat Masiri. Adios mengapresiasi inisiatif keluarga besar Masiri karena kegiatan tersebut memadukan kepedulian terhadap lingkungan dengan silaturahmi.

Semangat yang ditunjukkan warga Masiri juga memiliki akar kuat dalam sejarah sosial Indonesia. Gotong royong telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno bahkan menyebut gotong royong sebagai gagasan yang dapat menjadi dasar kehidupan bernegara. Pemerintah mencatat konsep tersebut sebagai bagian penting dari pemikiran Soekarno mengenai Pancasila dan kebersamaan bangsa.

Dalam konteks pembangunan daerah, Adios berharap tradisi tersebut tidak berhenti pada kegiatan kebersihan

lingkungan, tetapi berkembang menjadi kebiasaan warga untuk menjaga fasilitas publik, memperkuat komunikasi, dan ikut menyelesaikan persoalan bersama.

“Kebersamaan dan gotong royong harus terus kita hidupkan. Pemerintah dan masyarakat harus berjalan bersama untuk membangun Buton Selatan,” pungkasnya.

Kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Busel La Ode Harwanto, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara La Ode Abdul Muzaffar, Anggota DPRD Busel La Ode Asmin, para asisten dan kepala OPD lingkup Pemkab Busel, Camat Batauga, Lurah Masiri, serta masyarakat setempat. Adios berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan sebagai sarana memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Buton Selatan. (*)

Wawali Baubau Wa Ode Hamsina Bacakan Sambutan Menteri, Remisi Jadi Jalan Reintegrasi Sosial, 173.706 Narapidana Terima Remisi

taat hukum.

Dalam sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan yang dibacakan Wa Ode Hamsinah Bolu disebutkan, pemerintah pada 2026 memberikan Remisi Umum kepada 173.706 narapidana dan Pengurangan Masa Pidana kepada 1.085 Anak Binaan di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan bentuk penghargaan negara terhadap warga binaan yang menunjukkan keberhasilan dalam mengikuti proses pembinaan selama menjalani masa pidana.

“Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata dari prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ini bukan sekadar pengurangan masa hukuman, melainkan bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan,” kata Wa Ode Hamsinah Bolu saat membacakan sambutan Menteri.

Secara historis, kebijakan remisi di Indonesia berkembang seiring perubahan pendekatan pemsarakatan dari paradigma penghukuman menuju pembinaan. Gagasan tersebut berakar dari pemikiran Sahardjo pada 1960 yang memperkenalkan konsep pemsarakatan sebagai pendekatan pembinaan bagi orang yang menjalani pidana. Perkembangan itu

kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsarakatan.

Di tingkat internasional, pendekatan serupa tercermin dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners atau Nelson Mandela Rules yang diadopsi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015. Standar tersebut menekankan perlakuan manusiawi terhadap narapidana serta pentingnya sistem pemsarakatan yang mendukung tujuan reintegrasi dan mempersiapkan mereka kembali ke tengah masyarakat.

Selain aspek remisi, sambutan Menteri juga menempatkan Lapas, Rumah Tahanan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai bagian strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Pemanfaatan lahan produktif untuk tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan terus didorong untuk membantu ketahanan pangan sekaligus memberikan keterampilan kerja

kepada warga binaan. “Bagi narapidana, remisi diharapkan menjadi motivasi untuk terus menjaga disiplin dan meningkatkan kualitas diri,” demikian pesan yang disampaikan dalam sambutan tersebut.

Pada bagian lain, pemerintah menekankan penguatan integritas aparatur pemsarakatan. Tidak boleh ada toleransi terhadap keterlibatan petugas dalam peredaran narkotika, penyalahgunaan kewenangan, pungutan liar, ataupun pelanggaran etik yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi. “Tidak ada ruang dan zero tolerance bagi keterlibatan petugas dalam peredaran narkotika, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, maupun pelanggaran etik lainnya yang mencederai marwah institusi,” tegasnya.

Bagi warga binaan yang menerima remisi dan mereka yang memperoleh kebebasan pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Wa Ode Hamsinah Bolu menyampaikan ucapan selamat sekaligus mengajak mereka menjadikan kesempatan tersebut sebagai awal kehidupan baru. Pemerintah berharap mereka mampu bekerja secara jujur,

Kapolres Baubau Rangkul Sara Kidhina, Dorong Persatuan Kesultanan Buton

mencari jalan keluar atas persoalan dualisme kelembagaan Kesultanan Buton.

Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 18.30 Wita itu dihadiri sekitar 20 anggota Sara Kidhina. Kapolres didampingi Kasubag Faskon Baglog Polres Baubau IPTU LD. Muhammad Wahid, S.Sos., Kanit II Sat Intelkam AIP-DA Agung Sumantri, S.H., serta Kanit III Sat Intelkam AIPTU La Ode Yusrin, S.H., berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan dialog.

Kapolres melalui Kasi Humas Polres Baubau IPTU Rino Asnan mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari ikhtiar membangun komunikasi dengan berbagai elemen yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan adat dan keagamaan Kesultanan Buton. Menurut dia, dukungan banyak pihak diperlukan agar persoalan dualisme dapat diselesaikan tanpa menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

“Bapak Kapolres berharap melalui komunikasi, kebersamaan, serta semangat persatuan dari seluruh pihak, persoalan dualisme kelembagaan Kesultanan Buton dapat diselesaikan secara damai, bijaksana, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Rino.

Sara Kidhina menyambut positif langkah tersebut, meskipun menegaskan lembaganya tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri secara langsung persoalan internal Kesultanan Buton. Sara Kidhina menyarankan agar penyelesaian melibatkan tokoh masyarakat, Pemerintah Daerah, serta unsur lain yang memiliki kewenangan sehingga prosesnya dapat berlangsung

objektif dan mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.

Menurut Rino, Polres Baubau memandang persatuan sebagai modal penting untuk menjaga keharmonisan sosial dan stabilitas daerah. Karena itu, pendekatan yang ditempuh bukan mencampuri urusan internal kelembagaan, melainkan membuka ruang komunikasi agar pihak-pihak terkait dapat menemukan solusi bersama.

“Polres Baubau memandang bahwa persatuan merupakan kekuatan bersama. Karena itu, diperlukan komunikasi yang baik dan keterlibatan Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, serta seluruh unsur terkait untuk mencari solusi terbaik demi terciptanya keharmonisan dan stabilitas di Kota Baubau,” ujarnya.

Secara historis, Kesultanan Buton memiliki posisi penting dalam perjalanan sejarah kawasan Sulawesi Tenggara dan jalur perdagangan maritim Nusantara. Sistem kesultanan berkembang dari Kerajaan Buton dan kemudian membentuk tata pemerintahan serta perangkat adat dan keagamaan yang saling berkaitan. Dalam perkembangannya, nilai adat dan Islam menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Buton hingga kini.

Dalam konteks itu, Sara Kidhina dikenal sebagai perangkat syariat dan adat dalam struktur Kesultanan Buton yang berkaitan dengan urusan keagamaan, peradilan agama, dan hukum Islam di lingkungan Masjid Agung Keraton Buton. Setelah silaturahmi berakhir, Kapolres Baubau bersama peserta melaksanakan salat Isya berjamaah dan doa bersama sebagai bentuk ikhtiar agar proses penyatuan kembali kelembagaan Kesultanan Buton dapat berlangsung damai dan memperoleh kemudahan.(*)

Cegah Kebakaran dan Kekeringan, BPBD Buton Selatan dan Polsek Batauga Turun Langsung Edukasi Warga dan Perkuat Pengawasan Sumber Api

dilakukan melalui sosialisasi langsung pada Kamis (20/8/2026) di Desa Lawela, Desa Lawela Selatan, Lingkungan Kelurahan Bandar Batauga, dan Kelurahan Bosoa. Wilayah-wilayah itu menjadi sasaran karena dinilai memiliki potensi terjadinya kebakaran selama kondisi cuaca kering.

Kepala BPBD Buton Selatan Saharuddin Singka mengatakan pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan petugas setelah kebakaran terjadi. Menurut dia, keterlibatan masyarakat diperlukan sejak tahap awal dengan menghindari aktivitas yang dapat menjadi sumber api, termasuk pembakaran lahan dan sampah secara sembarangan.

“Kalau memang diperlukan untuk membuka lahan, harus dilakukan dengan cara yang aman dan bertanggung jawab, memperhatikan ketentuan serta berkoordinasi dengan instansi terkait,” kata Saharuddin.

Saharuddin juga meminta warga memeriksa sumber api di lingkungan rumah, memastikan kompor dan tungku telah padam sebelum tidur atau meninggalkan rumah, serta mengecek instalasi listrik secara berkala. Puntung rokok pun diminta tidak dibuang sembarangan karena dapat memicu kebakaran ketika mengenai material yang mudah terbakar. Kewaspadaan itu, kata dia, penting karena kebakaran sebelumnya pernah terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Lawela, Siom-

pu, dan Kadatua. “Kami tidak melarang masyarakat berkebun atau membuka lahan. Tetapi mari dilakukan dengan aman dan bertanggung jawab, karena apa yang kita lakukan bisa berdampak pada hidup dan kehidupan orang lain,” ujarnya.

Selain api, BPBD mengingatkan ancaman berkurangnya ketersediaan air selama kemarau. Masyarakat diminta menghemat air bersih, menggunakannya secara efisien, serta mulai menyiapkan sumber air cadangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. “Memasuki musim kemarau, kita perlu menghemat penggunaan air bersih agar ketersediaannya tetap terjaga,” kata Saharuddin.

Ancaman tersebut sejalan dengan kecenderungan global. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) mencatat panas ekstrem dan kekeringan dapat memperbesar risiko kebakaran, sementara laporan WMO dan UNEP memproyeksikan kejadian kebakaran ekstrem secara global dapat meningkat hingga 50 persen pada akhir abad ini jika tren perubahan iklim dan perubahan penggunaan lahan berlanjut. Indonesia juga memiliki pengalaman berat: kebakaran hutan dan lahan pada 2015 membakar sekitar 2,6 juta hektare.

Karena itu, BPBD Buton Selatan dan Polsek Batauga mendorong masyarakat menjadikan pencegahan sebagai tanggung jawab bersama. Kesiapsiagaan, penggunaan air secara hemat, dan pengendalian sumber api dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran meluas serta mengurangi dampak kekeringan selama musim kemarau. (*)

menaati hukum, memperbaiki hubungan dengan keluarga, serta berkontribusi positif di lingkungan masing-masing sebagai bagian dari upaya bersama menuju Indonesia Emas 2045.(*)

Prabowo Minta Menteri Bekerja Keras, Posisi Banyak yang Mengincar



Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan bernada gurauan kepada para menteri Kabinet Merah Putih agar bekerja sungguh-sungguh di tengah tuntutan pengabdian yang disebutnya sangat berat. Prabowo mengatakan menteri yang tidak sanggup menjalankan tugas dipersilakan memberi jalan karena banyak pihak yang berminat menggantikan posisi tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo ketika meresmikan peluncuran dan ground-breaking Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp di kawasan Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8).

“Yang tidak sanggup boleh minggir, banyak yang ingin menggantikan saudara,” kata Prabowo sambil tertawa dalam acara tersebut.

Gurauan itu disampaikan ketika Prabowo menggambarkan padatnya agenda pemerintahan. Menurut dia, jajaran Kabinet Merah Putih harus siap bekerja bahkan pada hari yang ditetapkan sebagai libur nasional.

Prabowo menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Selasa sebagai contoh. Meskipun merupakan hari libur nasional, pemerintah tetap menjalankan agenda strategis berupa peluncuran program energi surya berskala besar.

“Hari ini hari penting, walaupun libur, walaupun Maulid Nabi, kita berjuang untuk rakyat kita,” ujar Prabowo.

Presiden mengatakan ritme kerja tersebut merupakan bagian dari konsekuensi ketika seseorang menerima amanah untuk mengabdikan melalui pemerintahan. Ia menyebut Kabinet Merah Putih kemungkinan tidak banyak memiliki kesempatan menikmati tanggal merah sebagai

hari libur.

“Memang di Kabinet Merah Putih mungkin hampir tidak ada tanggal merah dan itu risiko, risiko pengabdian,” katanya.

Di luar pesan Prabowo kepada para menteri, agenda di Jembrana tersebut menandai dorongan pemerintah untuk memperbesar penggunaan energi surya dalam sistem kelistrikan nasional. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS dengan total kapasitas 100 GWp dapat dipercepat dan diselesaikan pada 2029.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan program PLTS 100 GWp merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.

Presiden, menurut Prasetyo, telah memberikan instruksi agar pembangunan pembangkit tenaga surya tersebut dipercepat. Pemerintah memperkirakan program itu dapat menghasilkan efisiensi biaya listrik sekitar Rp73,9 triliun per tahun.

Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS mencapai 30 GWp. Pada saat yang sama, sebanyak 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ditargetkan dihentikan.

Target tersebut memperlihatkan perubahan skala pengembangan energi surya Indonesia dalam lebih dari satu dekade terakhir. Pada 2012, Kementerian ESDM mencatat pemanfaatan energi surya Indonesia baru sekitar 10 MWp dan ketika itu pemerintah telah menyusun peta jalan untuk meningkatkan kapasitas PLTS.

Enam tahun kemudian, kapasitas terpasang PLTS nasional telah mencapai sekitar 91,45 MW berdasarkan data Kementerian ESDM hingga 2018. Angka itu

mencakup pembangkit yang terhubung jaringan maupun sistem di luar jaringan.

Perkembangan kemudian meningkat lebih cepat. Pada akhir 2023, kapasitas PLTS terpasang tercatat 573,8 MW, antara lain mendorong beroperasinya PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MW. Pemerintah juga mencatat kapasitas pembangkit energi terbarukan secara keseluruhan mencapai 13.155 MW pada 2023.

Pada 2024, pemerintah kembali mencatat penambahan kapasitas energi terbarukan sebesar 217,73 MW sepanjang semester pertama. PLT surya menjadi salah satu sumber yang menunjukkan capaian kuat dalam periode tersebut.

Pemerintah juga memperluas kebijakan pendukung pemanfaatan energi surya. Pada Januari 2024, Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 mengenai PLTS Atap mulai berlaku sebagai pengganti aturan sebelumnya, dengan tujuan mempercepat implementasi PLTS Atap yang terhubung ke jaringan listrik.

Langkah tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang transisi energi Indonesia. Pada 2017, pemerintah mencatat kapasitas PLTS dan PLT mikrohidro secara gabungan meningkat menjadi 259,8 MW dari 122,7 MW pada 2014. Pada periode yang sama, pemerintah menempatkan pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari upaya mencapai target bauran EBT 23 persen pada 2025.

Rencana 100 GWp kini membawa pengembangan energi surya ke skala yang jauh lebih besar. Kementerian ESDM sebelumnya menyatakan tahap awal proyek akan dimulai dengan pembangunan 17 GW yang didukung sistem penyimpanan energi baterai atau battery energy storage system (BESS) sekitar 33 GW.

Indonesia tidak

bergerak sendirian dalam memperbesar kapasitas energi surya. Secara global, ekspansi pembangkit surya juga berlangsung sangat cepat. Badan Energi Internasional (IEA) mencatat penambahan kapasitas energi terbarukan dunia mencapai sekitar 800 GW pada 2025, dengan tenaga surya fotovoltaik menyumbang lebih dari tiga perempat kapasitas baru tersebut.

IEA juga mencatat kapasitas baru PLTS global pada 2025 untuk pertama kalinya melampaui 600 GW dalam satu tahun. Dengan tambahan tersebut, kapasitas kumulatif tenaga surya dunia mencapai sekitar 2.800 GW dan menjadi teknologi pembangkit dengan kapasitas terpasang terbesar secara global.

Di dalam negeri, pemerintah menyebut Indonesia memiliki potensi energi surya sekitar 3.294 GWp. Namun, kapasitas terpasang hingga April 2026 masih sekitar 1,5 GWp. Kesenjangan antara potensi dan pemanfaatan itulah yang menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong pembangunan PLTS dalam skala 100 GWp.

Pembangunan tersebut dirancang bertahap, yakni Tahap I sebesar 17 GWp, Tahap II mencapai 18 GWp, dan Tahap III sebesar 30 GWp. Pemerintah juga memproyeksikan program tersebut tidak semata-mata menghasilkan listrik, tetapi menjadi penggerak investasi di sektor pembangkit, baterai, dan jaringan.

Pengembangan PLTS 100 GWp juga diarahkan untuk memperkuat industri solar photovoltaic (PV) di dalam negeri serta menciptakan lapangan pekerjaan hijau atau green jobs. Dengan demikian, agenda transisi energi yang disampaikan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan pengurangan penggunaan energi fosil, tetapi juga diarahkan menjadi bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi.

Di tengah target energi yang besar tersebut, pesan Prabowo kepada jajaran menteri menjadi penegasan mengenai tuntutan kerja pemerintah. Ia mengingatkan bahwa jabatan di kabinet bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang menuntut kesiapan bekerja dalam situasi dan waktu yang tidak selalu mengenal hari libur. (*)

Projo Jelaskan Video Budi Arie soal Wacana Percepatan Pemilu 2029

JAKARTA, BP- DPP Projo memberikan penjelasan mengenai video Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang beredar luas di media sosial dan memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan Pemilu 2029 berlangsung lebih cepat. Projo menegaskan rekaman tersebut merupakan potongan video dari sebuah forum internal, bukan rekaman utuh yang menggambarkan keseluruhan pembicaraan.

Sekretaris Jenderal DPP Projo Fredy Alex Damanik mengatakan pernyataan Budi Arie dalam video tersebut harus dilihat dalam konteks pembahasan yang lebih luas. Menurut dia, potongan rekaman yang beredar tidak sepenuhnya memperlihatkan isi diskusi serta maksud pembicaraan yang berlangsung dalam forum tersebut.

“Pertama, video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berbagai kemungkinan,” kata Fredy dalam video yang disampaikan pada Selasa (25/8).

Fredy menjelaskan, forum tersebut merupakan acara silaturahmi dalam rangka Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia yang mempertemukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan para relawannya. Dalam pertemuan itu, peserta tidak hanya membahas persoalan politik, tetapi juga mencermati perkembangan sosial, ekonomi, dan situasi kebangsaan.

Menurut Fredy, diskusi internal tersebut berlangsung singkat dan dimaksudkan untuk memetakan berbagai persoalan yang dinilai berkembang di tengah masyarakat. Sejumlah peserta kemudian menyampaikan pandangan serta kemungkinan solusi yang dapat ditempuh untuk menghadapi dinamika nasional.

Masukan para relawan itu, lanjut Fredy, disampaikan kepada Jokowi dengan harapan mantan presiden tersebut dapat meneruskannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Hubungan komunikasi antara Jokowi dan Prabowo menjadi salah satu alasan para relawan memilih menyampaikan aspirasi melalui Jokowi.

“Hal ini disampaikan oleh para relawan kepada Pak Jokowi dengan harapan beliau berkenan menyampaikan kepada Presiden Prabowo untuk perbaikan bangsa ke depannya,” ujar Fredy.

Ia mengatakan Jokowi dalam pertemuan tersebut lebih banyak mendengarkan pandangan para relawan mengenai perkembangan situasi nasional. Jokowi, kata Fredy, kemudian meminta seluruh pihak tetap tenang dan tidak berlebihan dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang.

“Situasi baik-baik saja, ekonomi masih tumbuh baik, inflasi terkendali, jadi tidak perlu ada yang dikawatirkan,” kata Fredy mengutip pesan Jokowi dalam forum tersebut.

Penjelasan Projo itu muncul setelah potongan video Budi Arie beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut, Budi menyebut adanya kemungkinan perubahan konstelasi politik yang berlangsung lebih cepat dari perkiraan. Ia bahkan mengatakan telah menyampaikan dugaan tersebut secara langsung kepada Jokowi.

“Tadi saya sudah bisikkan ke Pak Jokowi, ‘Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’” kata Budi dalam potongan video yang beredar.

Budi kemudian mempertanyakan kesiapan para relawan jika terjadi perubahan politik sebelum jadwal Pemilu 2029. Ia menyebut pembahasan tersebut sebagai salah

satu skenario alternatif yang perlu dipikirkan apabila muncul situasi yang tidak terbayangkan sebelumnya.

Dalam konteks ketatanegaraan, Pemilu Indonesia secara konstitusional dilaksanakan setiap lima tahun. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menetapkan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Ketentuan tersebut menjadi dasar periodisasi penyelenggaraan pemilu nasional.

Karena itu, pembicaraan mengenai kemungkinan pemilu berlangsung lebih cepat tidak dengan sendirinya mengubah jadwal pemilu. Setiap perubahan terhadap penyelenggaraan pemilu harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPU sendiri pada 2026 telah mempersiapkan berbagai masukan untuk Pemilu 2029 dengan mempertimbangkan pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pemilu 2029 juga memiliki lanskap kelembagaan yang berbeda dibandingkan pemilu sebelumnya. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memutuskan pemilu nasional dan pemilu lokal dipisahkan. Pemilu nasional mencakup pemilihan DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sedangkan pemilu lokal mencakup DPRD dan pemilihan kepala daerah dengan jeda waktu tertentu.

Perkembangan itu menunjukkan bahwa dinamika sistem pemilu memang terus berubah melalui proses hukum dan politik. Namun, perubahan desain pemilu berbeda dengan percepatan waktu penyelenggaraan pemilu. Keduanya membutuhkan dasar hukum dan mekanisme ketatanegaraan yang berbeda.

Pernyataan Budi Arie juga menyinggung kondisi politik saat ini dengan gerakan aktivis pada 1997-1998. Perbandingan tersebut merujuk pada periode ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi yang kemudian berkembang menjadi gejolak politik dan demonstrasi mahasiswa secara luas.

Krisis moneter Asia yang mulai menghantam Indonesia pada 1997 menyebabkan tekanan ekonomi semakin berat. Ketidakpuasan publik kemudian berkembang menjadi gerakan politik yang lebih besar. Pada 12 Mei 1998, empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas dalam aksi demonstrasi. Peristiwa itu diikuti kerusuhan Mei dan semakin kuatnya desakan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Tekanan politik mencapai puncaknya pada Mei 1998. Mahasiswa menduduki kompleks DPR/MPR pada 18 Mei dan Soeharto akhirnya menyatakan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa. Pergantian tersebut menjadi tonggak dimulainya era Reformasi di Indonesia.

Dalam sejarah internasional, pemilu yang digelar lebih awal juga pernah terjadi dalam kondisi politik tertentu. Filipina, misalnya, menggelar pemilu presiden lebih awal pada 7 Februari 1986 setelah Presiden Ferdinand Marcos menyerukan pemilihan tersebut di tengah meningkatnya tekanan politik dan ketidakpuasan publik. Pemilu itu kemudian menjadi salah satu rangkaian peristiwa yang berujung pada People Power Revolution dan berakhirnya kekuasaan Marcos.

Contoh lain terjadi di Inggris pada 2017. Perdana Menteri Theresa May mengusulkan pemilu lebih awal dari jadwal yang semula direncanakan. House of Commons kemudian menyetujui penyelenggaraan pemilu dini pada 8 Juni 2017 dengan suara 522 berbanding 13. Mekanisme tersebut dimungkinkan oleh aturan konstitusional dan perundang-undangan Inggris saat itu.

Perbandingan sejarah tersebut memperlihatkan bahwa pemilu lebih awal di berbagai negara memiliki mekanisme

Kukuhkan IKA Smansa, Gubernur ASR Ungkap Empat Prioritas Pembangunan Sultra di Tengah Efisiensi

SULTRA, BP- Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menegaskan pemerintah provinsi kini memusatkan kebijakan pembangunan pada empat sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta agromaritim berbasis ketahanan pangan. Penajaman prioritas itu dilakukan menyusul keterbatasan ruang fiskal daerah dan kebijakan efisiensi anggaran.

Penjelasan tersebut disampaikan Andi Sumangerukka saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni (IKA) SMAN 1 Kendari periode 2025-2029 di Aula SMA Negeri 1 Kendari, Senin (24/8/2026). Dalam kegiatan itu, gubernur juga mengukuhkan pengurus IKA yang dipimpin Andi Ady Aksar.

Menurut Andi, pemerintah daerah harus menyesuaikan target pembangunan dengan kemampuan keuangan agar setiap program benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan untuk menyederhanakan fokus dari delapan prioritas yang disampaikan pada masa kampanye menjadi empat sektor yang dinilai paling mendesak.

Ia menjelaskan, ketika dilantik bersama Wakil Gubernur Sultra Hugua pada Februari 2025, APBD telah lebih dahulu ditetapkan. Pemerintah kemudian baru memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian program pada APBD 2026. Namun, proses tersebut berlangsung bersamaan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang turut memengaruhi kemampuan pemerintah membiayai berbagai agenda pembangunan.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus melibatkan semua stakeholder yang ada,” kata Andi dalam sambutannya.

Di bidang pendidikan, pemerintah provinsi menyiapkan kebijakan satu SMA unggulan di setiap kabupaten/kota. Penentuan sekolah dilakukan melalui kajian dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk jumlah peserta didik. Berdasarkan kajian tersebut, SMA Negeri 4 Kendari ditetapkan sebagai SMA unggulan tingkat provinsi, sementara SMA Negeri 1 Kendari tetap menjadi bagian dari perhatian pemerintah.

Sekolah unggulan akan memperoleh pembenahan fasilitas,

kurikulum, dan tenaga pendidik. Kepala sekolah yang akan memimpin telah melalui proses seleksi, sedangkan penempatan guru disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap tenaga pendidik yang ditugaskan di sekolah unggulan.

Kebijakan tersebut ditempatkan dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang lebih panjang. Secara konstitusional, pendidikan merupakan bagian dari mandat negara sejak UUD 1945 menegaskan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. Di tingkat daerah, Sulawesi Tenggara sendiri memiliki sejarah sebagai provinsi tersendiri sejak 1964 berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1964, meskipun regulasi pembentukannya kemudian diperbarui melalui UU Nomor 7 Tahun 2022.

Mengenai beasiswa, Andi mengatakan bahwa pemerintah harus mengikuti RPJMD dan nomenklatur anggaran yang telah ditetapkan. Program beasiswa yang tercantum dalam anggaran daerah adalah Sultra Cerdas. Adapun program di luar nomenklatur tersebut memerlukan pembahasan dengan DPRD serta koordinasi dengan pemerintah pusat. “Berdasarkan RPJMD, yang beasiswa yang ada di dalam anggaran itu adalah Sultra Cerdas. Di luar daripada itu tidak ada,” ujarnya.

Pemerintah juga menyiapkan Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat. Untuk Sekolah Rakyat tingkat provinsi, pembangunan dijadwalkan dimulai pada Oktober. Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat dari berbagai wilayah Sulawesi Tenggara.

Pada sektor kesehatan, perhatian pemerintah diarahkan pada persoalan akses layanan, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Pemerintah menyiapkan ambulans laut dan ambulans darat yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis. Kebijakan itu ditujukan untuk mengurangi hambatan transportasi ketika warga membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Saya sampaikan kepada dinas, pokoknya ini gratis. Jangan sampai saya dengar nanti ada yang bayar,” tegas Andi.

K e b i j a k a n mendekatkan pelayanan kesehatan dengan masyarakat sejalan

dengan perkembangan paradigma kesehatan dunia. Deklarasi Alma-Ata pada 1978 yang diselenggarakan WHO dan UNICEF menjadi salah satu tonggak penting pelayanan kesehatan primer dengan menempatkan akses kesehatan sebagai bagian dari hak fundamental manusia. Empat dekade kemudian, komitmen tersebut diperkuat melalui Deklarasi Astana pada 2018 untuk mendorong cakupan kesehatan semesta.

Dalam konteks Sulawesi Tenggara, pemerintah menargetkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 95 persen pada 2027. Pemerintah juga merencanakan pengembangan Rumah Sakit Bahteramas menjadi rumah sakit modern dengan bangunan delapan lantai. Sistem pelayanan satu pintu dan digital disiapkan untuk membuat layanan lebih terintegrasi.

Di bidang infrastruktur, pemerintah provinsi menargetkan pembangunan dan peningkatan jalan sekitar 40 kilometer setiap tahun. Pekerjaan tersebut akan diarahkan ke kabupaten/kota, terutama daerah yang membutuhkan dukungan infrastruktur. Sejumlah pelabuhan juga disiapkan untuk dibangun atau diselesaikan guna memperkuat konektivitas masyarakat pesisir dan kepulauan.

Andi menekankan pembangunan pelabuhan tidak berhenti pada perbaikan fasilitas yang sudah ada. Infrastruktur tersebut diharapkan menghasilkan perubahan fisik yang dapat dirasakan langsung masyarakat. Pemerintah provinsi juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan sarana transportasi laut dan konektivitas antardaerah.

Sektor perumahan menjadi bagian lain dari agenda pembangunan. Pemerintah tidak hanya menargetkan pembangunan unit rumah, tetapi juga kawasan permukiman beserta jalan, listrik, dan fasilitas kesehatan. Konsep tersebut terutama diarahkan ke wilayah pesisir dan diintegrasikan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih yang tersebar di 61 titik di Sulawesi Tenggara.

Salah satu lokasi yang mendapat perhatian ialah Kampung Nelayan Merah Putih Sorue Jaya, Desa Sorue Jaya, Kecamatan

Soropia. Di kawasan tersebut direncanakan pembangunan 100 unit rumah. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan 603 unit rumah dibangun pada tahun ini, kemudian meningkat menjadi 1.500 unit pada tahun berikutnya dan dilanjutkan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.

Menurut Andi, pendekatan kawasan diperlukan karena persoalan permukiman berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, termasuk stunting dan kekurangan gizi. Perbaikan lingkungan, akses pelayanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar dinilai menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai persoalan tersebut. Pendekatan lintas sektor ini juga sejalan dengan prinsip kesehatan primer global yang menempatkan faktor sosial dan ekonomi sebagai bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Selain program fisik, gubernur meminta dunia usaha ikut memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan memenuhi kewajibannya kepada pemerintah. Penerimaan dari sektor usaha, kata dia, turut menentukan kemampuan daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Gubernur menegaskan paparan mengenai keterbatasan anggaran bukan dimaksudkan sebagai keluhan. Pemerintah ingin masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan memahami kondisi fiskal daerah sehingga pembangunan dapat dijalankan melalui kolaborasi dan penentuan prioritas yang terukur.

Pengukuhan IKA SMAN 1 Kendari sendiri berlangsung melalui pembacaan Surat Keputusan Pengurus IKA oleh Kepala SMA Negeri 1 Kendari, pembacaan naskah pengukuhan oleh gubernur, pelantikan pengurus, dan penyerahan bendera pataka kepada Ketua IKA SMAN 1 Kendari Andi Ady Aksar.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan IKA SMAN 1 Kendari yang juga mantan Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Asisten III Sekretariat Kota Kendari, Kepala SMA Negeri 1 Kendari, serta pengurus dan alumni IKA SMAN 1 Kendari. (*Mashuri*)

Jembatan Garuda Dibangun 35 Hari, Kini Hubungkan Tiga Kelurahan di Kendari



KENDARIDua Jembatan Garuda yang menghubungkan sejumlah kawasan di Kota Kendari resmi digunakan setelah diresmikan pada Senin (24/8/2026). Infrastruktur yang dibangun TNI Angkatan Darat melalui Kodim 1417 Kendari itu dinilai memperkuat konektivitas warga sekaligus menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI dalam menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat.

Peresmian dihadiri Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., Wakil Wali Kota Kendari, serta Sekretaris Daerah Kota Kendari. Kehadiran jajaran pemerintah daerah tersebut menandai dukungan pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Dua jembatan itu menghubungkan Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, dengan Kelurahan Tobuuha dan Kelurahan Punggolaka di Kecamatan Puuwatu. Posisi tersebut membuat jembatan memiliki fungsi penting sebagai jalur penghubung antarkawasan yang selama ini membutuhkan akses mobilitas yang lebih mudah.

Bagi masyarakat, keberadaan jembatan tidak hanya berkaitan dengan tersedianya jalur fisik baru. Akses penghubung yang lebih baik berpotensi memperlancar kegiatan ekonomi, perjalanan warga, aktivitas sosial, serta akses menuju berbagai pelayanan publik.

Wali Kota Kendari mengatakan pembangunan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat dapat ditangani melalui kerja bersama lintas lembaga. Ia menyampaikan penghargaan kepada TNI Angkatan Darat, khususnya Kodim 1417 Kendari, yang ikut mengambil peran dalam pembangunan infrastruktur di wilayah kota.

“Pembangunan Jembatan Garuda ini sangat membantu masyarakat Kota Kendari, khususnya dalam mempermudah akses dan mobilitas warga antarwilayah,” kata Siska Karina Imran.

Menurut dia, kontribusi tersebut menunjukkan pentingnya sinergi pemerintah daerah dan TNI dalam menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Infrastruktur yang dibangun tidak berhenti pada aspek fisik, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi warga yang menggunakannya.

Dandim 1417 Kendari Kolonel Arm Danny Arianto Pardamean Girang menjelaskan, pembangunan kedua jembatan berlangsung relatif cepat. Pekerjaan dilakukan selama sekitar 30 hingga 35 hari sampai konstruksi dinyatakan siap digunakan dan kemudian diresmikan.

Rentang waktu pengerjaan tersebut menjadi salah satu aspek penting dari pembangunan karena kebutuhan akses masyarakat dapat segera dijawab. Setelah selesai, jembatan diharapkan dapat digunakan secara berkelanjutan dan mendukung mobilitas warga dari tiga kelurahan yang terhubung.

“Pembangunan ini merupakan salah satu wujud kontribusi TNI Angkatan Darat dalam membantu pemerintah daerah dan masyarakat melalui infrastruktur yang memiliki manfaat langsung,” ujar Danny.

Program Jembatan Garuda sendiri bukan kegiatan yang berdiri sendiri di Kendari. Pada 9 Maret 2026, TNI AD meluncurkan 200 titik Jembatan Garuda secara serentak di berbagai daerah Indonesia. Program tersebut diarahkan untuk membuka akses masyarakat yang menghadapi keterbatasan konektivitas, termasuk wilayah yang dipisahkan sungai.

Perkembangannya berlangsung cepat. Hingga 13 Agustus 2026, TNI AD melaporkan telah mengerjakan 3.008 jembatan, dengan 2.500 di antaranya telah selesai. Infrastruktur tersebut disebut telah membuka akses menuju 7.807 desa, 9.008 sekolah, 4.502 fasilitas kesehatan, dan 4.618 fasilitas ekonomi serta memberikan manfaat kepada sekitar 4,5 juta jiwa.

Di sejumlah daerah, pola pembangunan serupa menunjukkan bahwa jembatan dapat menjadi instrumen penting untuk memangkas hambatan mobilitas. Di Maros, misalnya, Jembatan Garuda dibangun untuk menghubungkan desa dan membantu anak-anak sekolah memperoleh akses yang lebih mudah. Di Buleleng, program yang sama diarahkan untuk memperkuat konektivitas desa dan mendukung kegiatan ekonomi serta pendidikan.

Dalam sejarah pembangunan Indonesia, fungsi strategis jembatan juga terlihat pada pembangunan Jembatan Ampera di Palembang. Jembatan tersebut mulai dibangun pada 1962 dan diresmikan pada 1965, sekaligus menjadi salah satu tonggak pembangunan jembatan modern Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat, pembangunan Ampera ketika itu menjawab persoalan konektivitas masyarakat yang sebelumnya bergantung pada penyeberangan Sungai Musi.

Perkembangan infrastruktur jembatan kemudian terus bergerak mengikuti kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan wilayah. Di tingkat nasional, pembangunan jembatan tidak hanya ditujukan untuk memperpendek jarak, tetapi juga membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pelayanan pemerintahan.

Konteks tersebut membuat dua Jembatan Garuda di Kendari memiliki arti lebih luas daripada sekadar konstruksi penghubung. Infrastruktur itu menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas kawasan perkotaan sekaligus memperlihatkan bagaimana kolaborasi antarlembaga dapat diarahkan untuk menjawab persoalan sehari-hari masyarakat.

Dengan beroperasinya dua jembatan tersebut, warga Kelurahan Kadia, Tobuuha, dan Punggolaka kini memiliki jalur penghubung yang diharapkan lebih memudahkan aktivitas. Pemerintah daerah dan TNI juga memiliki tanggung jawab lanjutan untuk memastikan infrastruktur tersebut dirawat sehingga manfaatnya dapat bertahan dalam jangka panjang.

Peresmian dua Jembatan Garuda pada akhirnya menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat ketika ditempatkan pada lokasi yang tepat dan dikerjakan berdasarkan kebutuhan. Sinergi pemerintah daerah dan TNI pun diharapkan terus berlanjut pada pembangunan lain yang mampu memperkuat akses dan pemerataan pelayanan di Kota Kendari. (*)

Bupati Buton Tengah Azhari dan Majelis Taklim Bersama Siswa Sekolah Rakyat Gelar Yasinan, Jadi Penguat Karakter Siswa



Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah memperkuat pembinaan karakter dan spiritual peserta didik Sekolah Rakyat melalui kegiatan keagamaan. Salah satunya diwujudkan lewat Yasinan bersama yang digelar di Masjid Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Buton Tengah, Jumat (21/8/2026).

Kegiatan tersebut mempertemukan Bupati Buton Tengah Dr. Azhari, Ketua TP-PKK Buton Tengah Umi Noranah Azhari, peserta didik Sekolah Rakyat, Majelis Taklim Buton Tengah, dan majelis taklim desa. Mereka mengikuti rangkaian Yasinan dalam suasana khidmat sebagai bagian dari pembinaan spiritual di lingkungan pendidikan.

Bagi pemerintah daerah, aktivitas keagamaan tersebut tidak ditempatkan sekadar sebagai kegiatan ibadah rutin. Yasinan menjadi medium untuk membangun kebersamaan sekaligus menanamkan nilai religius kepada anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat.

Pembinaan itu penting karena Sekolah Rakyat sejak awal dirancang bukan semata sebagai ruang pembelajaran akademik. Pemerintah pusat mengembangkan program tersebut sebagai instrumen untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sekaligus memutus

mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Secara nasional, gagasan Sekolah Rakyat mulai dipercepat pemerintah pada awal 2025. Kementerian Sosial menyebut program tersebut ditujukan bagi anak-anak keluarga miskin, dengan proses seleksi pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah menargetkan program itu mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026.

Dalam perkembangannya, pemerintah juga menempatkan pembentukan karakter sebagai bagian penting dari Sekolah Rakyat. Kementerian Sosial menyebut sekolah tersebut diharapkan menjadi sarana pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, dan mobilitas sosial antargenerasi.

Karena itu, kegiatan Yasinan di SRT 1 Buton Tengah memiliki konteks yang lebih luas. Pendidikan peserta didik diarahkan agar tidak berhenti pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan akhlak, kepribadian, kedisiplinan, dan kepedulian sosial.

Bupati Buton Tengah Dr. Azhari bersama unsur pemerintah daerah hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pendidikan berbasis karakter. Kehadiran pimpinan daerah sekaligus memperlihatkan keterlibatan pemerintah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang meng-

gabungkan aspek intelektual dan spiritual.

Ketua TP-PKK Buton Tengah Umi Noranah Azhari juga turut mengikuti kegiatan bersama peserta didik dan kelompok majelis taklim. Keterlibatan unsur masyarakat dalam kegiatan tersebut memperluas ruang interaksi antara anak-anak Sekolah Rakyat dan lingkungan sosial di sekitarnya.

"Pembinaan anak-anak tidak cukup hanya melalui pendidikan akademik. Nilai agama dan pembentukan akhlak juga harus menjadi bagian dari proses pendidikan," demikian pesan yang tercermin dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pola pembinaan seperti itu sejalan dengan konsep Sekolah Rakyat yang dikembangkan pemerintah secara nasional. Pada tahap awal pelaksanaannya, pemerintah bahkan merancang Sekolah Rakyat dengan pendekatan pendidikan berasrama sehingga pembinaan peserta didik berlangsung lebih intensif, termasuk dalam aspek kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks Buton Tengah, penguatan pendidikan spiritual tersebut diarahkan untuk mendukung visi daerah dalam membangun Buton Tengah sebagai Kota Santri dan Kota Pendidikan. Sekolah tidak hanya diharapkan meng-

hasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik, tetapi juga generasi yang memiliki landasan moral dan karakter kuat.

Yasinan bersama kemudian menjadi salah satu bentuk konkret dari pendekatan tersebut. Melalui kegiatan yang melibatkan pemerintah, peserta didik, dan masyarakat, nilai kebersamaan dan religiusitas diharapkan tumbuh secara bersamaan di lingkungan Sekolah Rakyat.

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mendorong agar aktivitas keagamaan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari pembinaan peserta didik. Dengan demikian, Sekolah Rakyat di daerah itu diharapkan mampu menjadi ruang pendidikan yang menyatukan pengetahuan, karakter, spiritualitas, serta kesiapan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.

Pada akhirnya, kegiatan di Masjid SRT 1 Buton Tengah bukan hanya mencatat pelaksanaan Yasinan pada Jumat (21/8/2026). Lebih jauh, kegiatan tersebut memperlihatkan upaya pemerintah daerah menempatkan pendidikan karakter dan spiritual sebagai fondasi dalam menyiapkan sumber daya manusia Buton Tengah yang berkualitas dan berdaya saing. (*)

Bupati Afrudin Soroti Fiskal Daerah dalam Pembahasan KUA-PPAS 2027



BUTON UTARA, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Utara bersama DPRD mulai mematangkan arah kebijakan anggaran daerah untuk 2027. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) digelar melalui rapat paripurna DPRD di Gedung DPRD Kabupaten Buton Utara, Senin (24/8/2026), dengan perhatian utama pada penguatan fiskal, efisiensi belanja, dan penetapan target pendapatan yang realistis.

Rapat tersebut dihadiri Bupati Buton Utara Afrudin Mathara, S.H., M.H., bersama Wakil Bupati Rahman, S.K.M., M.Kes. Dari unsur legislatif hadir Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara Hj. Hasriyanti Ali, S.T., M.Si., beserta wakil ketua dan anggota DPRD.

Bagi pemerintah daerah, pembahasan KUA dan PPAS bukan sekadar tahapan administratif sebelum APBD ditetapkan. Dokumen tersebut menjadi instrumen untuk menyelaraskan prioritas pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah serta menentukan ruang fiskal yang dapat digunakan untuk membiayai program pemerintahan pada tahun berikutnya.

Bupati Afrudin mengatakan hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD perlu diperkuat dalam setiap proses penyusunan kebijakan anggaran. Menurut dia, kerja sama eksekutif dan legislatif harus diarahkan pada kepentingan yang lebih mendasar, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing daerah.

"KUA dan PPAS harus menjadi kebijakan dasar yang disusun berdasarkan sinkronisasi dengan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, kapasitas fiskal daerah, serta sejalan dengan RKPD Tahun 2027," kata Afrudin.

Rancangan KUA dan PPAS tersebut disusun Pemerintah Kabupaten Buton Utara dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Setelah diajukan kepada DPRD, dokumen itu dibahas bersama sebelum nantinya menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Substansi utama yang akan menentukan arah APBD 2027 meliputi prioritas pembangunan, kebijakan ekonomi, serta kebijakan keuangan daerah. Ketiga aspek tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Afrudin menilai sinkronisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas serta kesinambungan fiskal. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat membuat perubahan kebijakan fiskal nasional memiliki pengaruh terhadap kemampuan daerah membiayai program pembangunan.

"Transfer ke daerah masih menjadi pilar utama pembiayaan penye-

lenggaraan pemerintahan daerah," ujarnya.

Dalam konteks historis, persoalan tersebut berkaitan dengan perubahan besar sistem pemerintahan Indonesia setelah era Reformasi. Desentralisasi yang mulai diterapkan secara luas pada 2001 mengubah pola hubungan fiskal pusat dan daerah. World Bank mencatat, reformasi tersebut mengalihkan lebih banyak tanggung jawab pelayanan publik kepada pemerintah daerah sekaligus mengubah mekanisme transfer fiskal melalui antara lain Dana Alokasi Umum dan bagi hasil.

Perubahan itu tidak berdiri sendiri dalam perkembangan global. OECD mencatat bahwa sejak dekade 1990-an hingga awal 2000-an, banyak negara meningkatkan desentralisasi belanja, termasuk pada sektor pendidikan, infrastruktur, lingkungan, dan pelayanan masyarakat. Pertumbuhan tanggung jawab pemerintah subnasional tersebut kemudian diikuti meningkatnya peran hibah atau transfer antarpemerintahan untuk menutup kesenjangan antara kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan daerah.

Di Indonesia, kerangka pengelolaan keuangan negara kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sementara pembagian urusan pemerintahan daerah saat ini antara lain berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua kerangka tersebut mempertegas pentingnya tata kelola keuangan yang terencana dan hubungan yang jelas antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah.

Karena itu, Pemkab Buton Utara mengarahkan penyusunan APBD 2027 pada pembentukan postur fiskal yang lebih tangguh. Strateginya mencakup pengendalian defisit secara hati-hati, efisiensi belanja secara terukur, serta penyesuaian target pendapatan agar tidak bertumpu pada proyeksi yang terlalu optimistis.

"Langkah-langkah strategis dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk membangun postur fiskal daerah yang tangguh melalui pengendalian defisit secara hati-hati, efisiensi belanja secara terukur, serta penyesuaian target pendapatan yang lebih realistis," ujar Afrudin.

Namun, angka yang tercantum dalam Rancangan KUA dan PPAS belum menjadi angka final. Pemerintah daerah menegaskan bahwa proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan masih bersifat sementara dan dapat disesuaikan kembali setelah pagu definitif ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Posisi tersebut membuat pembahasan bersama DPRD menjadi penting. Setiap perubahan asumsi pendapatan maupun belanja akan berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD 2027.

Rapat paripurna juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara, para staf ahli bupati, para asisten sekretaris daerah, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara.

Melalui pembahasan KUA dan PPAS, pemerintah daerah dan DPRD memiliki ruang untuk menyelaraskan kemampuan fiskal dengan kebutuhan pembangunan masyarakat. Proses tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu pijakan menuju penyusunan APBD Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2027 yang lebih terukur, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. (Ardi)

BPOM Raih Predikat Proaktif, Bidik Level Unggul dalam Pengadaan Pemerintah



JAKARTA, BP-Transformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memasuki tahap baru setelah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) lembaga tersebut meraih predikat Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) Level Proaktif dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pengakuan itu diberikan setelah BPOM dinilai mampu meningkatkan kematangan kelembagaan, sumber daya manusia, serta sistem informasi pengadaan.

Predikat tersebut diserahkan Kepala LKPP Sarah Sadiqa kepada Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam Rapat Koordinasi SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan III 2026 di Plaza Gedung LKPP, Jakarta, Selasa (11/8/2026). Forum bertema “Pengadaan Tanpa Batas” itu mempertemukan pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan kepala UKPBJ dari berbagai daerah untuk menyelaraskan kebijakan serta memperkuat integritas pengadaan pemerintah.

Bagi BPOM, pencapaian itu bukan sekadar penghargaan kelembagaan. UKPBJ kini

diarahkan berfungsi sebagai mitra strategis organisasi, bukan hanya pelaksana administrasi pengadaan. Perubahan tersebut dilakukan melalui penguatan kelembagaan, standarisasi, pemenuhan variabel kematangan UKPBJ, serta pendekatan yang lebih proaktif dalam mengantisipasi persoalan pengadaan.

“Proses transformasi tersebut dibersamai oleh LKPP. Tak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai mitra strategis yang memberikan arah, standar, pembinaan, serta dorongan bagi UKPBJ untuk terus meningkatkan kematangannya,” kata Taruna Ikrar.

Penilaian PKP-BJ sendiri dilaksanakan pada Juni 2026, setelah BPOM mengikuti Entry Meeting Penilaian PKP-BJ Level Proaktif. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP Dwi Wahyuni Kartianingsih menjelaskan, proses tersebut menguji kematangan tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, dan sistem informasi pengadaan barang/jasa. UKPBJ BPOM juga tercatat sebagai UKPBJ pertama pada tingkat kementerian/lembaga yang mengajukan penilaian PKP-BJ.

Penguatan sistem tersebut sejalan dengan perjalanan reformasi pengadaan di Indone-

sia. LKPP dibentuk pada 6 Desember 2007 melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagai bagian dari upaya membangun sistem pengadaan yang efektif, efisien, transparan, terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perkembangan regulasi kemudian ditandai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menggantikan rezim Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan diarahkan untuk memperkuat prinsip value for money serta mempermudah pengawasan pengadaan.

Dorongan tersebut juga merupakan bagian dari kecenderungan global. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNCITRAL telah mengembangkan kerangka hukum pengadaan publik sejak Model Law 1993, kemudian memperbaruinya melalui Model Law on Public Procurement pada 2011. Kerangka tersebut menempatkan transparansi, persaingan, objektivitas, keadilan, integritas, dan efisiensi sebagai unsur penting untuk mencegah penyalahgunaan serta memastikan manfaat optimal dari belanja pemerintah.

Sarah Sadiqa menegaskan bahwa pengadaan pemerintah harus mengikuti perubahan zaman dan dapat

menjadi contoh tata kelola bagi institusi di luar pemerintahan. “Inovasi, kolaborasi, dan transparansi harus berjalan beriringan dengan integritas, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujarnya. Dalam forum tersebut, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reni Suzana juga menyampaikan keynote speech mengenai penguatan tata kelola, integritas, dan dampak pembangunan. Hadir pula Wakil Ketua Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura.

Setelah memperoleh Level Proaktif, BPOM menargetkan transformasi UKPBJ berlanjut menuju Level Strategis dan kemudian Level Unggul. Target tersebut ditempuh dengan menjadikan fungsi pengadaan sebagai instrumen pencipta nilai tambah bagi organisasi sekaligus memastikan belanja pemerintah menghasilkan manfaat optimal bagi negara. “PKP-BJ bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari komitmen untuk terus memberikan yang terbaik,” ujar Taruna. (*)

Karhutla Meluas, Menkes Minta Warga Lindungi Diri dari Paparan PM2,5



Peliput: Prasetyo M

JAKARTA, BP-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta masyarakat di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meningkatkan kewaspadaan terhadap kabut asap dengan memakai masker, membatasi aktivitas di luar ruangan, serta memantau kualitas udara secara berkala. Hingga 21 Agustus, sekitar tiga juta jiwa di 37 kabupaten/kota dilaporkan terpapar langsung kabut asap.

Data Kemenkes menunjukkan karhutla telah berdampak pada 87 kabupaten/kota di tujuh provinsi, yakni Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Kondisi tersebut membuat perlindungan terhadap kesehatan pernapasan menjadi perhatian, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat yang memiliki riwayat asma dan penyakit paru.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan masyarakat perlu segera menggunakan masker ketika kualitas udara memburuk. Warga juga dianjurkan mengurangi kegiatan di luar rumah dan me-

manfaatkan informasi indeks kualitas udara sebelum memutuskan beraktivitas di ruang terbuka.

“Yang pertama untuk karhutla, banyak partikel-partikel, istilahnya PM2.5. Itu banyak bertebaran di udara dan itu sangat mengganggu paru-paru kita, pernapasan kita,” kata Budi, Jumat (21/8).

PM2,5 menjadi salah satu ancaman utama dari asap kebakaran karena berukuran sangat kecil, yakni kurang dari 2,5 mikrometer. Partikel tersebut dapat terhirup hingga bagian terdalam paru-paru dan memicu iritasi mata serta saluran pernapasan, batuk, sesak napas, hingga memperburuk penyakit paru yang telah ada. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menyebut PM2,5 sebagai ancaman kesehatan utama dari asap kebakaran hutan.

Pengalaman Indonesia menunjukkan persoalan asap karhutla bukan fenomena baru. Pada 2015, BNPB mencatat sekitar 2,61 juta hektare hutan dan lahan terbakar dengan kerugian ekonomi mencapai Rp221 triliun. Saat itu, jumlah titik panas yang terdeteksi mencapai 129.813 dan kualitas udara di sejumlah wilayah sempat berada pada kategori sangat berbahaya.

Dampak kesehatan akibat asap juga pernah tercatat dalam skala besar. Pada Oktober 2015, BNPB melaporkan sekitar 43 juta jiwa terpapar asap di Sumatera dan Kalimantan, sementara 503 ribu orang dilaporkan mengalami ISPA. Asap bahkan menurunkan kualitas udara hingga Malaysia, Singapura, dan Filipina.

Secara global, ancaman tersebut semakin mendapat perhatian karena kebakaran hutan meningkat dalam frekuensi dan tingkat keparahan. WHO pada 2026 menyatakan asap kebakaran dapat menurunkan kualitas udara secara drastis dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan, termasuk serangan asma dan sesak napas, dengan anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit kronis sebagai kelompok yang lebih rentan.

Kemenkes mengingatkan masyarakat tidak menunggu kondisi memburuk untuk mencari pertolongan. Warga yang mengalami sesak napas, batuk menetap, nyeri dada, atau iritasi mata berat diminta segera mendatangi puskesmas atau rumah sakit terdekat. Langkah tersebut diperlukan agar paparan asap tidak berkembang menjadi gangguan kesehatan yang lebih serius. (*)

PT FAREN GRAFIKA Baubau Post KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi	Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun, Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman	Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak: Jamaludin	Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana	Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks
			Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara	

Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, Lima Masih Hilang, Polisi Temukan Sejumlah Kejanggalan, Selidiki Selisih Data Manifes Penumpang



Laporan: Amran

SURABAYA, BP- Penyidikan kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Sumenep, Madura, Jawa Timur, memasuki babak baru setelah polisi menemukan ketidaksesuaian data manifes penumpang dengan jumlah orang yang tercatat berhasil dievakuasi. Penyidik kini menelusuri dokumen pelayaran sekaligus pihak yang dinilai paling bertanggung jawab atas insiden tersebut.

KMP Mutiara Sentosa II terbakar saat dalam pelayaran rute Surabaya-Makassar pada Minggu (2/8). Dari data terakhir operasi pencarian dan pertolongan, sebanyak 238 orang telah dievakuasi dari kapal tersebut. Sebanyak 233 orang ditemukan selamat, sedangkan lima lainnya meninggal dunia.

Ketidaksesuaian mulai terlihat ketika data manifes yang beredar sebelumnya mencatat hanya 232 orang berada di atas kapal. Angka tersebut berbeda dengan jumlah 238 orang yang kemudian berhasil dievakuasi dalam operasi gabungan.

Dirpolairud Polda Jawa Timur Kombes Arman Asmara mengatakan penyidik telah mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan keberangkatan dan keselamatan pelayaran kapal. Dokumen tersebut antara lain manifes penumpang dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

“Kami sudah mempunyai data dan dokumen lengkap. Mulai manifes, meski tidak ada kesesuaian, hingga Surat Persetujuan Berlayar, dan semuanya sedang kami teliti dan dalam,” kata Arman di Surabaya, Selasa (25/8).

Menurut Arman, pemeriksaan dokumen tersebut diperlukan untuk mengetahui

penyebab munculnya perbedaan data sekaligus memastikan pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pencatatan penumpang. Polisi tidak hanya menelaah dokumen, tetapi juga mencocokkannya dengan keterangan saksi dan bukti lain yang diperoleh selama penyidikan.

Persoalan manifes semakin kompleks setelah operasi pencarian dan pertolongan resmi dihentikan pada Selasa (4/8). Setelah operasi berakhir, polisi masih menerima laporan dari keluarga dan rekan yang menyebut terdapat lima orang yang belum diketahui keberadaannya.

Salah satu dari lima orang yang dilaporkan hilang disebut telah diakui tercatat dalam manifes oleh operator kapal, PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP). Kondisi tersebut menjadi bagian yang turut dialami penyidik untuk memastikan kesesuaian antara daftar penumpang, data operator, dan jumlah korban dalam kejadian.

Lima orang yang hingga kini dilaporkan belum diketahui keberadaannya ialah Bustam Sanusi, Andik Herman, Abdul Manan, Abdurrahman, dan Abdul Hamid. Laporan tersebut menjadi perhatian karena muncul setelah operasi SAR dinyatakan selesai.

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii sebelumnya menyatakan operasi pencarian dan penyelamatan korban KMP Mutiara Sentosa II secara resmi ditutup setelah 238 orang berhasil dievakuasi. Penutupan operasi dilakukan pada Selasa (4/8).

Di sisi lain, penyidik menemukan indikasi adanya kecenderungan saling melempar tanggung jawab sejak tahap awal penanganan kebakaran hingga proses hukum

berlangsung. Polisi kini menjadikan dugaan tersebut sebagai salah satu aspek yang perlu diperiksa lebih jauh.

“Ada ke arah sana dalam kasus terbakarnya KM Mutiara Sentosa II, ini yang sedang kami garis bawah,” ujar Arman.

Untuk mengurai rangkaian kejadian, Ditpolairud Polda Jatim sedikitnya telah memeriksa tujuh saksi. Jumlah saksi tersebut masih dapat bertambah apabila penyidik menemukan keterangan atau bukti tambahan yang membutuhkan pendalaman.

“Kami sedang mendalami siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus terbakarnya kapal ini,” kata Arman.

Pemeriksaan tersebut akan diarahkan untuk mengetahui rangkaian kejadian sejak kapal berlayar hingga proses evakuasi korban. Polisi juga akan menguji kesesuaian dokumen operasional dengan kondisi faktual di lapangan, termasuk data manifes dan SPB.

Secara historis, persoalan keselamatan kapal penumpang menjadi perhatian dunia setelah berbagai kecelakaan laut mendorong lahirnya standar keselamatan internasional. Organisasi Maritim Internasional (IMO) mencatat, aturan pertama SOLAS atau International Convention for the Safety of Life at Sea disusun pada 1914 sebagai respons terhadap tenggelamnya Titanic pada 1912.

Konvensi tersebut kemudian berkembang melalui revisi pada 1929, 1948, 1960, hingga SOLAS 1974 yang mulai berlaku pada 1980.

Dalam perkembangannya, aspek kebakaran menjadi salah

satu perhatian utama. SOLAS 1974 memuat ketentuan khusus mengenai perlindungan, deteksi, dan pemadaman kebakaran serta pengaturan sarana penyelamatan bagi penumpang. IMO juga menjelaskan bahwa pengalaman dari sejumlah kecelakaan kapal penumpang turut mendorong penguatan standar keselamatan internasional.

Ketentuan internasional tersebut menunjukkan bahwa keselamatan pelayaran tidak hanya bergantung pada kemampuan penanganan ketika kecelakaan terjadi, tetapi juga pada ketepatan prosedur, kesiapan sistem keselamatan, pengelolaan kapal, dan ketersediaan informasi mengenai orang yang berada di atas kapal. IMO bahkan mencantumkan pentingnya informasi lengkap mengenai penumpang dalam perkembangan ketentuan keselamatan kapal penumpang.

Dalam kasus Mutiara Sentosa II, ketidaksesuaian manifes menjadi salah satu titik penting penyidikan karena data penumpang berkaitan langsung dengan proses penghitungan korban, evakuasi, pencarian orang hilang, serta penentuan tanggung jawab operator maupun pihak terkait lainnya.

Hingga kini, polisi masih mendalami seluruh dokumen dan keterangan yang telah dikumpulkan. Penyidik belum menetapkan pihak yang paling bertanggung jawab dan masih melakukan pengujian terhadap bukti-bukti yang tersedia untuk mengungkap secara utuh penyebab serta rangkaian kejadian kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. (*)

Hasil Forensik Sutrimo Ditargetkan Keluar Pekan Ini, 27 Saksi Diperiksa

JAKARTA, BP- Polda Metro Jaya menargetkan hasil pemeriksaan forensik jenazah Sutrimo diterima penyidik pada pekan ini. Hasil laboratorium tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam penyidikan untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo yang dinilai janggal oleh keluarganya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan penyidik masih berkoordinasi dengan dokter forensik terkait hasil pemeriksaan terhadap jenazah. Setelah seluruh analisis laboratorium selesai, hasilnya diharapkan dapat dijelaskan kepada publik oleh tim ahli.

“Kemungkinan kita menerima hasil di minggu ini dari dokter forensik. Ini masih dikomunikasikan dari penyidik,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (25/8).

Penyidikan perkara tersebut tidak hanya bertumpu pada pemeriksaan jenazah. Polisi hingga kini telah meminta keterangan dari 27 saksi untuk memperjelas rangkaian peristiwa sebelum Sutrimo ditemukan tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia.

“Yang pasti sampai detik ini dalam proses penyidikan ada 27 saksi yang diperiksa,” ujar Budi.

Sutrimo ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri pada Kamis (23/7). Ia kemudian dibawa menggunakan ambulans ke RS Muhammadiyah Taman Puring. Namun, setibanya di rumah sakit, Sutrimo dinyatakan telah meninggal dunia.

Kematian tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan dari pihak keluarga. Dugaan adanya kejanggalan membuat keluarga melaporkan perkara itu kepada kepolisian di Banyumas. Penanganan laporan selanjutnya diteruskan kepada Polda Metro Jaya.

Salah satu langkah yang ditempuh penyidik adalah melakukan ekshumasi terhadap makam Sutrimo di Desa Wlahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, pada Rabu (12/8). Proses pembongkaran makam berlangsung sekitar tiga setengah jam, mulai pukul 09.30 hingga 13.00 WIB.

Dalam ekshumasi itu, tim dokter forensik mengambil sejumlah sampel untuk pemer-

iksaan lebih lanjut. Pemeriksaan diperlukan karena jenazah telah dimakamkan sekitar tiga pekan sehingga kondisi tubuh telah mengalami proses pembusukan.

Ketua Tim Dokter Forensik, Prof Yudi, menjelaskan bahwa tim sebelumnya menerima informasi mengenai keluarnya buih dari hidung dan mulut Sutrimo ketika korban meninggal. Namun, tanda tersebut tidak lagi terlihat ketika proses ekshumasi dilakukan.

“Memang informasi yang kami terima, jenazah Sutrimo ini mengeluarkan buih dari hidung dan mulutnya pada saat dia meninggal. Namun, pada waktu kami ekshumasi tadi, sudah tidak ada,” kata Yudi.

Meski tanda tersebut sudah tidak ditemukan, dokter forensik tetap mengambil sampel menggunakan metode swab. Sampel itu kemudian diperiksa di laboratorium untuk mengetahui kemungkinan adanya kandungan tertentu yang berkaitan dengan kondisi kematian Sutrimo.

Pemeriksaan lanjutan mencakup toksikologi, DNA, dan histopatologi. Ketiga jenis pemeriksaan tersebut memiliki fungsi berbeda dalam membantu dokter forensik menyusun kesimpulan berdasarkan bukti biologis yang masih dapat diperoleh dari jenazah.

“Kita tunggu dari hasil laboratorium tersebut, apakah itu dari toksikologi ataupun dari pemeriksaan DNA-nya ataupun dari pemeriksaan histopatologinya,” ujar Yudi.

Dalam konteks ilmu kedokteran forensik, pemeriksaan terhadap jenazah memang tidak berhenti pada pengamatan kondisi fisik. Materi pembelajaran kedokteran forensik Universitas Indonesia mencakup antara lain anatologi, kematian mendadak, toksikologi forensik, identifikasi, tempat kejadian perkara, hingga ekshumasi.

Perkembangan kedokteran forensik di Indonesia sendiri bukan hal baru. Kajian Universitas Indonesia mencatat bahwa pemanfaatan kedokteran forensik untuk kepentingan peradilan telah dilakukan sejak abad ke-19 pada masa pemerintahan kolonial dan pada awalnya banyak berkaitan dengan pemeriksaan jenazah serta autopsi.

Di tingkat inter-

nasional, toksikologi berkembang menjadi bidang ilmiah yang lebih sistematis sejak abad ke-19. Mathieu Orfila, yang hidup pada 1787-1853, dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan toksikologi modern melalui kajian mengenai hubungan informasi kimia dan biologis dengan racun.

Perkembangan tersebut membuat pemeriksaan forensik modern tidak sekadar menentukan kondisi tubuh korban, tetapi juga dapat melibatkan analisis laboratorium untuk mencari zat tertentu, identifikasi biologis, serta pemeriksaan jaringan. Di Indonesia, kedokteran forensik kini dipandang sebagai bidang yang berperan dalam membantu proses penegakan hukum dan penyelesaian persoalan medikolegal.

Dalam kasus Sutrimo, hasil pemeriksaan laboratorium menjadi penting karena kondisi jenazah yang telah mengalami pembusukan dapat memengaruhi proses pemeriksaan. Karena itu, kesimpulan mengenai penyebab kematian tidak semestinya ditarik hanya dari satu temuan, melainkan dari keseluruhan hasil pemeriksaan yang dilakukan tim ahli.

Polda Metro Jaya berharap hasil pemeriksaan tersebut dapat diterima pada pekan ini. Setelah hasil laboratorium tersedia, tim dokter forensik akan menjadi pihak yang menjelaskan temuan medis berdasarkan keahlian masing-masing.

“Mudah-mudahan minggu ini, karena yang bekerja adalah lab. Makanya kami juga berharap nanti setelah hasil lab, tim dokter forensik yang akan menyampaikan,” tutur Budi.

Dengan masih berlangsungnya pemeriksaan terhadap saksi dan analisis forensik, penyidik Polda Metro Jaya belum menyimpulkan penyebab maupun mekanisme kematian Sutrimo. Hasil ekshumasi, pemeriksaan laboratorium, serta keterangan para saksi akan menjadi rangkaian bukti yang digunakan untuk memperjelas perkara tersebut. (*)

Damkar Baubau Tangani Lima Kejadian, Tangani Ular dan Tiga di Antaranya Kebakaran Lahan, Tak Ada Korban Jiwa



Laporan
Penanganan/Mobilisasi Pasien Rujukan Ibu Hamil Warga Talaga Buton Tengah Ke Rumah Sakit

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Baubau menangani lima kejadian berbeda pada Minggu (23/8/2026), terdiri atas dua operasi penyelamatan dan tiga kebakaran lahan. Seluruh kejadian berhasil ditangani tanpa korban jiwa dan tanpa kerugian material yang signifikan.

Tiga kebakaran lahan terjadi di Kelurahan Baadia serta dua lokasi di Kelurahan Lipu. Di Baadia, api membakar lahan sekitar 15 x 25 meter saat kondisi angin cukup kencang. Petugas mengerahkan satu unit mobil Mako dengan lima personel untuk mengendalikan api.

Di Kelurahan Lipu, kebakaran pertama berlangsung di lingkungan Perumahan TPAS 3 dengan luas area terdampak sekitar 7 x 20 meter. Api diduga dipicu anak-anak yang bermain api. Se-

mentara kebakaran lainnya terjadi di samping Kantor BAPAS dengan luas lahan sekitar 20 x 25 meter. Api diduga meluas dari sisa pembakaran sampah dan ditangani satu unit mobil Mako dengan empat personel.

Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Baubau H. La Ode Ali Hasan, SE., M.Si., mengatakan kecepatan respons petugas turut didukung relawan Damkar yang memberikan informasi dan membantu proses penanganan di lapangan. "Dalam seluruh proses penanganan tersebut, tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian material yang signifikan," katanya, Minggu (23/8/2026).

Selain memadamkan kebakaran, Tim Rescue Damkar juga melakukan penyelamatan satwa di Perumahan Inulgi. Petugas mengevakuasi seekor ular berukuran hampir satu meter yang ditemukan berada di

dalam rumah warga. Setelah diamankan, ular tersebut dilepaskan kembali ke habitat yang sesuai.

Pada operasi lainnya, Tim Rescue membantu mobilisasi seorang pasien ibu hamil asal Talaga, Kabupaten Buton Tengah, menuju rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dua operasi tersebut menambah cakupan layanan Damkar yang tidak hanya berfokus pada pemadaman kebakaran, tetapi juga penyelamatan masyarakat dan satwa.

Ancaman kebakaran lahan bukan persoalan baru di Indonesia. BNPB mencatat luas kebakaran hutan dan lahan mencapai sekitar 2,6 juta hektare pada 2015, sementara data KLHK menunjukkan luas karhutla 2019 mencapai 1.649.258 hektare. Faktor cuaca kering, angin, serta aktivitas manusia menjadi bagian penting dalam meningkatkan risiko kebakaran.

Secara global, risiko kebakaran juga menjadi perhatian. Bank Dunia mencatat mendeteksi lebih dari 4,5 juta kebakaran berukuran lebih dari satu kilometer persegi di seluruh dunia sepanjang 2019, mencakup sejumlah kawasan seperti Amazon, Australia, Alaska, California, Eropa, Indonesia, dan Rusia.

Ali Hasan mengimbau masyarakat tidak membakar lahan maupun sampah secara sembarangan, membersihkan semak dan material mudah terbakar di sekitar rumah, serta mengawasi anak-anak agar tidak bermain api. Ia juga mengingatkan bahwa pembakaran yang menimbulkan kebakaran dan membahayakan masyarakat dapat berujung pada konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana. (*)

Dinkes Baubau Perkuat Kompetensi Nakes untuk Eliminasi Kusta dan Frambusia



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP-Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Baubau memperkuat kapasitas tenaga kesehatan di tingkat puskesmas untuk mempercepat penuntasan kasus kusta dan frambusia. Langkah tersebut ditempuh melalui Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia di Hotel Mira, Baubau, Senin (24/8/2026).

Pelatihan yang digelar bersama Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Sulawesi Tenggara itu diarahkan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat kemampuan tenaga kesehatan dalam mendeteksi dan menangani kasus di wilayah kerja masing-masing. Dinkes menilai penguatan sumber daya manusia penting karena penemuan kasus secara dini menjadi salah satu kunci memutus mata rantai penularan.

Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Kota Baubau Yuslina, SKM., M.Si., mengatakan penanganan kusta dan frambusia tidak cukup hanya mengandalkan pelayanan ketika pasien datang ke fasilitas kesehatan. Petugas diminta

aktif melakukan surveilans untuk menemukan gejala penyakit sedini mungkin. "Saya mohon Bapak/Ibu lebih peka terhadap bercak atau kelainan kulit di masyarakat. Jangan menunggu pasien datang, tetapi lakukan surveilans aktif," kata Yuslina dalam siaran persnya, Senin (24/8/2026).

Menurut Yuslina, keterlambatan diagnosis kusta dapat meningkatkan risiko kecacatan permanen. Karena itu, strategi penuntasan harus dilakukan secara menyeluruh melalui promosi kesehatan, penemuan kasus secara aktif, pengobatan yang tepat dan tuntas, surveilans ketat, serta pemberian obat pencegahan untuk menekan transmisi penyakit.

Penguatan program tersebut juga ditempatkan dalam konteks agenda nasional. Kementerian Kesehatan pada 2026 kembali menekankan deteksi dini, pengobatan tuntas, pencegahan bagi kontak erat, serta penemuan kasus aktif sebagai strategi percepatan eliminasi kusta. Secara global, WHO mencatat 172.717 kasus baru kusta dilaporkan dari 188 negara, wilayah, dan teritori pada 2024. Sebanyak 9.157 kasus baru telah mengalami kecacatan tingkat dua. Untuk frambu-

sia, tantangannya juga bersifat global. WHO mencatat penyakit yang terutama menyerang anak-anak tersebut pernah ditekan hingga 95 persen melalui kampanye pengobatan massal pada 1952-1964, tetapi lemahnya surveilans kemudian memicu kemunculan kembali kasus di sejumlah negara. India menjadi negara pertama yang dinyatakan bebas transmisi frambusia oleh WHO pada 2016. Di Indonesia, frambusia dan kusta telah lama masuk kelompok penyakit tropis terabaikan yang menjadi perhatian pemerintah.

Karena itu, Yuslina meminta peserta tidak berhenti pada penguasaan materi selama pelatihan. Pengetahuan tersebut harus diteruskan kepada dokter, perawat, dan bidan desa di puskesmas masing-masing, sekaligus diikuti disiplin dalam menggunakan sistem pelaporan berbasis digital. "Semakin banyak mata yang paham gejala kusta dan frambusia, semakin cepat kasus ditemukan," ujarnya. Dinkes Baubau berharap pengelola program di seluruh puskesmas semakin kompeten memberikan pelayanan, penanganan medis, dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. (*)